

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh

RAMAYANI

01870621292

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : RAMAYANI
 NIM : 01870621292
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Muhammad April, S.H., M.Hum
 NIK. 130 712 072

MENGETAHUI

DEKAN



Dr. H. Mahyarni, SE., M.M
 NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Sahwitri Triandani, SE. M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RAMAYANI
NIM : 01870621292
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN
 PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
 PEKANBARU PADA MASA PANDEMI *COVID-19*
 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun
 2019-2020)
TANGGAL UJIAN : 13 JULI 2021

DISETUJUI OLEH:

PENITIA PENGUJI

KETUA

Dr. Kamaruddin. S. Sos. M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

PENGUJI I

Dr. Khairil Hendry. SE. M.Si. Ak
 NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Afrizal. S. Sos. M. Si
 NIP. 19690419 200701 1 025


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA
PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)

OLEH :

RAMAYANI

Pajak Reklame merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yang mana keberadaannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui berapa besarnya Laju Pertumbuhan Pajak Reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Reklame. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data Pajak Reklame dan data Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru yang diperoleh dari Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat laju pertumbuhan pajak Reklame Tahun 2019 yaitu 32,47%, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan yaitu -9,53%. Sedangkan Rata-rata Penerimaan Pajak Reklame untuk Tahun 2019-2020 yaitu 11.47%, serta tingkat Rata-Rata kontribusi Pajak Reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar 3,27%. Adanya penurunan ini disebabkan oleh Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya ekonomi masyarakat, ditambah dengan kurangnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Kata Kunci : Pajak Reklame, Laju Pertumbuhan dan Pendapatan Asli Daerah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, penguasa seluruh alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, tiada sekutu bagi-Nya. Berkat rahmat dan hidayahnya kepada seluruh alam, sehingga sampai detik ini kira masih bisa menjalankan berbagai aktifitas dan kewajiban sehingga penulis dapat menyusun Tugas Akhir ini dengan Judul **“Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)”**. Yang merupakan salah satu kewajiban untuk bisa lulus dan mencapai gelar *Ahli Madya* (A.Md) dari program studi D3 Administrasi Perpajakan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan pada roh junjangan alam yakni nabi besar kita Muhammad SaW, yang telah membawa, mengarahkan dan membimbing umatnya kejalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah SWT.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis mengalami beberapa kendala, namun berkat bantuan dari beberapa pihak, motivasi, bimbingan serta doa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan sebaik-baiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Tugas Akhir ini dengan baik, yaitu :

1. Ayahanda Amat Safawi dan Ibunda Robakiyah tercinta yang selalu memberikan nasihat, motivasi serta dukungan, cinta dan kasih sayang selalu mendoakan setiap jalan hidup penulis dan memberikan semangat yang besar untuk cita-cita penulis, sehingga mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Dr. Mahyarni, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si.Ak., CA. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Sahwitri Triandani, SE., M.Si. selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Iren Violinda Anggriani, SE., M.Si. selaku Sekretaris Prodi D3 Adminiatrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Mustiqawati Ummul Fithriyyah, M.Si. selaku Pembimbing Akademis Penulis yang telah memberikan motivasi dan nasehat selama penulis menjadi Anak Didiknya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak Dr. Muhammad April, SH. M.Hum. selaku pembimbing penulis yang banyak memberikan arahan, bantuan, serta kemudahan penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
9. Seluruh dosen dan staf pengajar serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
10. Kepada keluarga besar tercinta, ulung, kakak ipar, adik-adik yang selalu menghibur penulis.
11. Teman-teman Prodi D3 Administarsi Perpajakan 2018, teman-teman kelas yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis. Semoga Tugas Akhir ini berguna dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2021

Penulis

RAMAYANI
NIM. 01870621292



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
1.5 Metode penelitian.....	9
1.6 Sistematika penulisan	11
BAB II	GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH
	KOTA PEKANBARU
	13
2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	
Kota Pekanbaru	13
2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ..	15
2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota pekanbaru ..	16
2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota	
Pekanbaru	33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 34

3.1	Tinjauan Teori	34
3.1.1	Pengertian Pajak	33
3.1.2	Fungsi Pajak	35
3.1.3	Jenis Pajak	36
3.1.4	Pengertian Pajak Daerah	39
3.1.5	Jenis-Jenis Pajak Daerah	39
3.1.6	Pengertian Pajak Reklame	40
3.1.7	Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame	41
3.1.8	Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak Reklame	42
3.1.9	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Reklame	45
3.1.10	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame	45
3.1.11	Pajak Reklame Tetap dan Pajak Reklame Insidentil	46
3.1.12	Perhitungan Pajak Reklame	48
3.1.13	Pajak Menurut Islam	52
3.2	Tinjauan Praktek	54
3.2.1	Laju Pertumbuhan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru Pada Tahun 2019-2020	54
3.2.2	Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	56
3.2.3	Hambatan Dalam Proses Pemungutan Pajak Reklame	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2.4 Upaya Yang di Lakukan Badan Pendapatan

Daerah Kota Pekanbaru 58

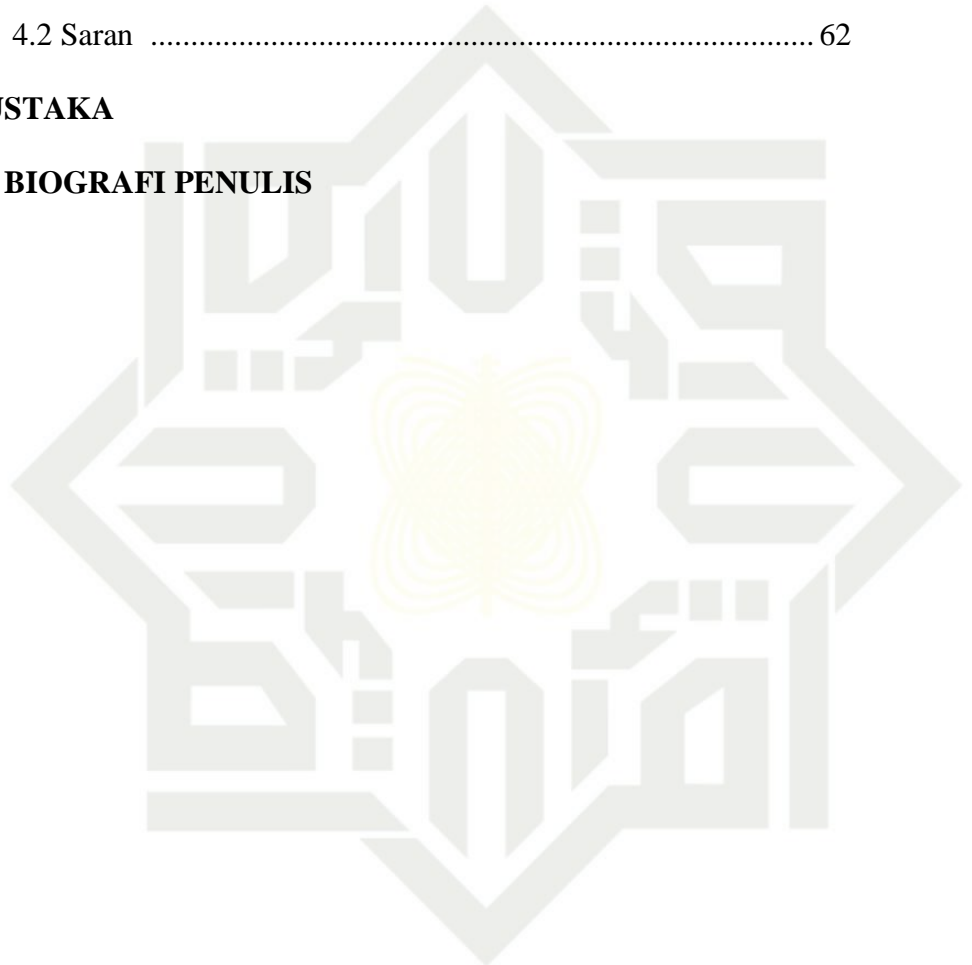
BAB IV PENUTUP 61

4.1 Kesimpulan 61

4.2 Saran 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN BIOGRAFI PENULIS



UIN SUSKA RIAU

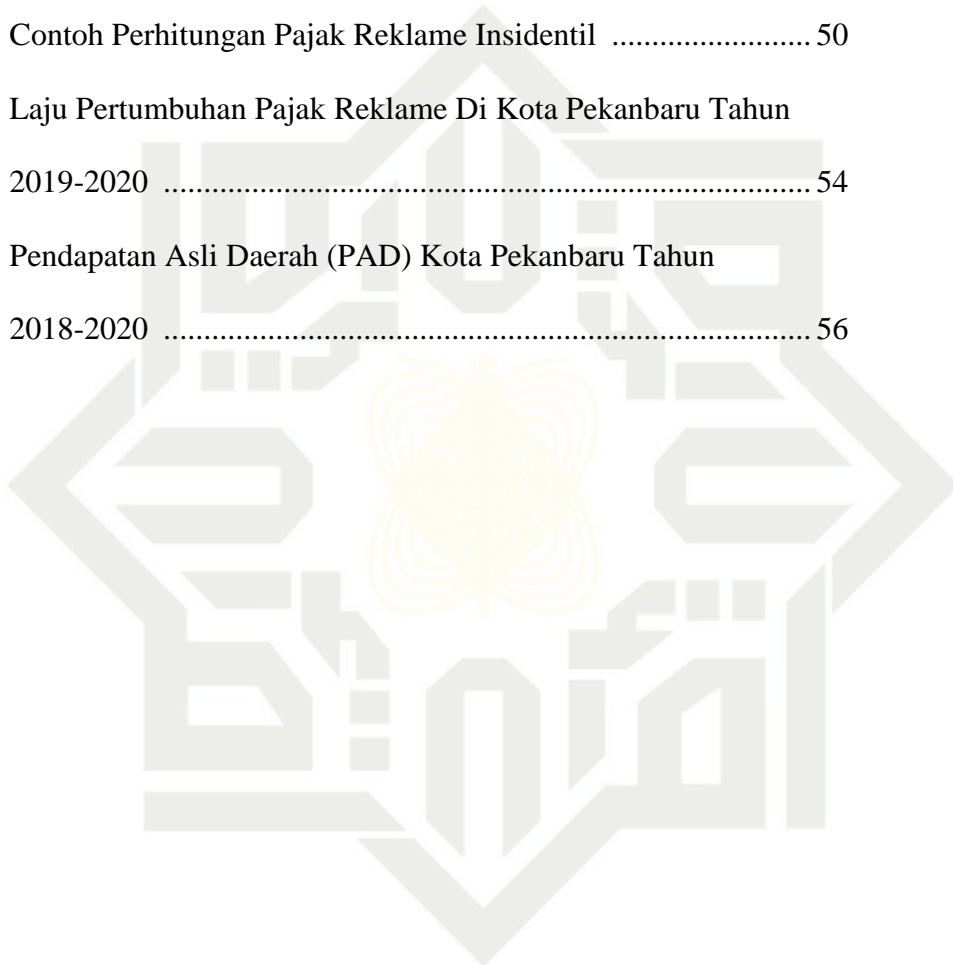


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan pajak Reklame Di Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020	6
Tabel 3.1	Contoh Perhitungan Pajak Reklame Tetap	48
Tabel 3.2	Contoh Perhitungan Pajak Reklame Insidentil	50
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Di Kota Pekanbaru Tahun 2019-2020	54
Tabel 3.4	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2018-2020	56



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru	33
Gambar 3.2	Reklame Megatron dan Billboard/ Papan	47
Gambar 3.3	Reklame Baliho dan Spanduk	47



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dalam pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber dana dan penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini dapat dirasakan oleh daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah yang secara resmi diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 1 Januari 2001 yaitu yang mengharuskan daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah yaitu dalam rangka menyelenggarakan pemerintah dan pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah ini menitikberatkan pada pemerintah kabupaten atau kota, agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri, oleh sebab itu diperlukan adanya upaya serius dari pemerintah kota untuk meningkatkan keuangan daerah. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka kota tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban serta kewenangan dalam mengatur daerahnya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya pemberian daerah otonomi diharapkan pemerintah mampu mendukung perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya memberikan dampak positif bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya seperti kualitas pelayanan dan jaminan hidup yang lebih baik. Adanya daerah otonom ini, setiap daerah dituntut untuk menggali potensi yang ada untuk memperkuat perekonomian daerahnya menjadi semakin besar dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desantralisasi. (penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah salah satu dalam sumber pemasukan daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan. Dengan adanya pendapatan asli daerah (PAD) maka akan meminimalisir ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halim (2004) menyatakan semakin tinggi peran PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mencerminkan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan dan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan. Peningkatan PAD akan tercapai apabila sumber-sumber yang mempengaruhinya mengalami peningkatan, agar sumber-sumber tersebut meningkat maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan daerah harus optimal. Salah satu sumber yang dapat meningkatkan PAD adalah pajak daerah.

Menurut John Hutagaol (2007:325) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Pasal 1 angka 6, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Karena pemerintahan daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota, yang berikan wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di Indonesia juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota pekanbaru adalah salah satu daerah otonom di Indonesia, yang merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Tentunya pemerintah setempat membutuhkan sumber dana yang cukup besar dan dapat diandalkan dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan di berbagai bidang sektor. Penetapan jenis-jenis pajak kabupaten/kota telah diberlakukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kota pekanbaru yaitu pajak reklame.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasa 1 angka 26 dan 27, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum. Untuk tarif reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25%, dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Badan pendapatan daeran (Bapenda) mempunyai perananan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dikota pekanbaru. Pada tahun 2020, kontribusi yang diberikan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hanya Rp 27,6 miliar. Sedangkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah Wajib Pajak Reklame yang aktif pada tahun 2018-2021 yang terdata pada Badan Pendapatan Daerah kota pekanbaru yaitu sebanyak 67.188 Wajib Pajak.

Berdasarkan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pembebasan Pajak Daerah Dalam Masa Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19) Di Kota Pekanbaru, dengan menimbang bahwa dengan adanya dampak bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* perlu adanya stimulus berupa pembebasan pajak dan penghapusan sanksi administratif pembayaran pajak daerah, selanjutnya bahwa dengan terjadinya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di kota pekanbaru, sehingga berdampak menurunnya kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan pasal 2 maksud peraturan walikota ini adalah sebagai pedoman Pembebasan Pajak Daerah, Pengangsuran, Penundaan, dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah dalam Masa Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Di kota Pekanbaru.

Berdasarkan Pasal 3 Tujuan Peraturan Walikota ini adalah memberikan stimulus bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Pengangsuran, Penundaan dan Penghapusan Sanksi Administratif diberikan Kepada Objek Pajak, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Non PLN, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun. Insentif ini berupa pembebasan denda atau sanksi keterlambatan sehingga wajib apajak cukup membayar tunggakan pokoknya.

Berikut adalah data target dan realisasi penerimaan Pajak Reklame yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pajak Reklame Kota Pekanbaru
Tahun 2018-2020**

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2018	Rp. 222,017,565,881	Rp. 23,367,011,100	10,52
2019	Rp. 148,126,884,833	Rp. 30,954,181,681	20,90
2020	Rp. 27,103,188,591	Rp. 28,003,177,528	103,32

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2021

Berdasarkan Tabel 1.1, diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 realisasi penerimaan pajak reklame di kota pekanbaru yakni sebesar Rp. 23,367,011,100 dari jumlah target sebesar Rp. 222,017,565,881 atau setara 10,52%. Pada tahun 2019 realiasi penerimaan pajak reklame kota pekanbaru sebesar Rp. 30,954,181,681 dari jumlah target Rp. 148,126,884,833 atau setara 20,90%. Namun Pada tahun 2020 pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menurunkan Target Penerimaan Pajak Reklame yang pada tahun 2019 sebesar Rp.148,126,884,833, menjadi Rp. 27,103,188,591, hal ini dilakukan karena realisasi penerimaan pada tahun 2019 hanya sebesar Rp

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30,954,181,681 jauh dari target yang diharapkan ditambah dengan situasi *covid-19* yang terjadi di Indonesia, adapun target yang telah ditentukan oleh pihak BAPENDA tidak mempengaruhi realisasi penerimaan Pajak Reklame itu sendiri. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak reklame dikota pekanbaru mengalami peningkatan yakni sebesar Rp. 28,003,177,528 dari jumlah target sebesar Rp. 27,103,188,591 atau setara 103,32%. Realiasi penerimaan pajak reklame dikota pekanbaru dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Hal ini diharapkan mampu membiayai daerahnya dengan cara menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan cara meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya pajak reklame.

Oleh karena itu petugas mempunyai hak dan kewajiban untuk memungut dan meingkatkan kinerja agar target pendaptan asli daerah tercapai. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikan sebuah karya tulis dengan judul **“ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

1. Berapa besar laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi *covid-19* di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dikota pekanbaru?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Dearah pada pandemi *covid-19* di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh badan pendapatan daerah kota pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame dikota pekanbaru.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi mahasiswa, untuk mengetahui dan menambah wawasan tentang analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* dan sebagai referensi bagi penulis lainnya dimasa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagi kantor badan pendatan daerah (Bapenda) kota pekanbaru, sebagai tambahan informasi dan masukan untuk bahan pertimbangan dan penyempurnaan laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kota pekanbaru pada masa *covid-19* dimasa yang akan datang.
- c. Bagi penulis, sebagai bahan Tugas Akhir pada program studi DIII Adminsistrasi Perpajakan dalam memahami analisis laju pertumbuhan penerimaan pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dikota pekanbaru pada masa pandemi *covid-19* (studi laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2019-2020) selain itu juga menambah ilmu dan pengetahuan khususnya tentang pajak Reklame.

1.5 METODE PENELITIAN

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang diambil oleh penulis dalam penelitian ini bertempat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Pekanbaru yang beralamatkan di Jalan Teratai No. 81, Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021 sampai April 2021

1.5.2 Jenis Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2015) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara, dalam metode ini penulis melakukan wawancara langsung kepada pegawai atau petugas pajak sebagai narasumber untuk mendapatkan data atau informasi yang berguna dalam menyusun Tugas Akhir.
- b. Dokumentasi, dalam metode ini penulis menggunakan salah satu teknik pengambilan data yang diperoleh dari dokumen atau catatan-catatan buku, jurnal, dan lain sebagainya.

1.5.4 Analisis Data

Data-data yang didapat dikumpulkan secara sistematis. Lalu penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait, dalam melakukan analisis data penulis menggunakan metode Deskriptif. Metode Deskriptif yaitu mengolah data-data yang sudah didapat dan membandingkan masalah dengan teori dan praktek dengan ketentuan tertentu, sehingga dapat ditarik kesimpulannya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan Tugas Akhir ini, penulis susun kedalam masing-masing bab yang terdiri dari beberapa sub bab berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMABARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KOTA PEKANBARU

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang berisikan tentang sejarah singkat berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan uraian tugas Badan Pendapatan daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

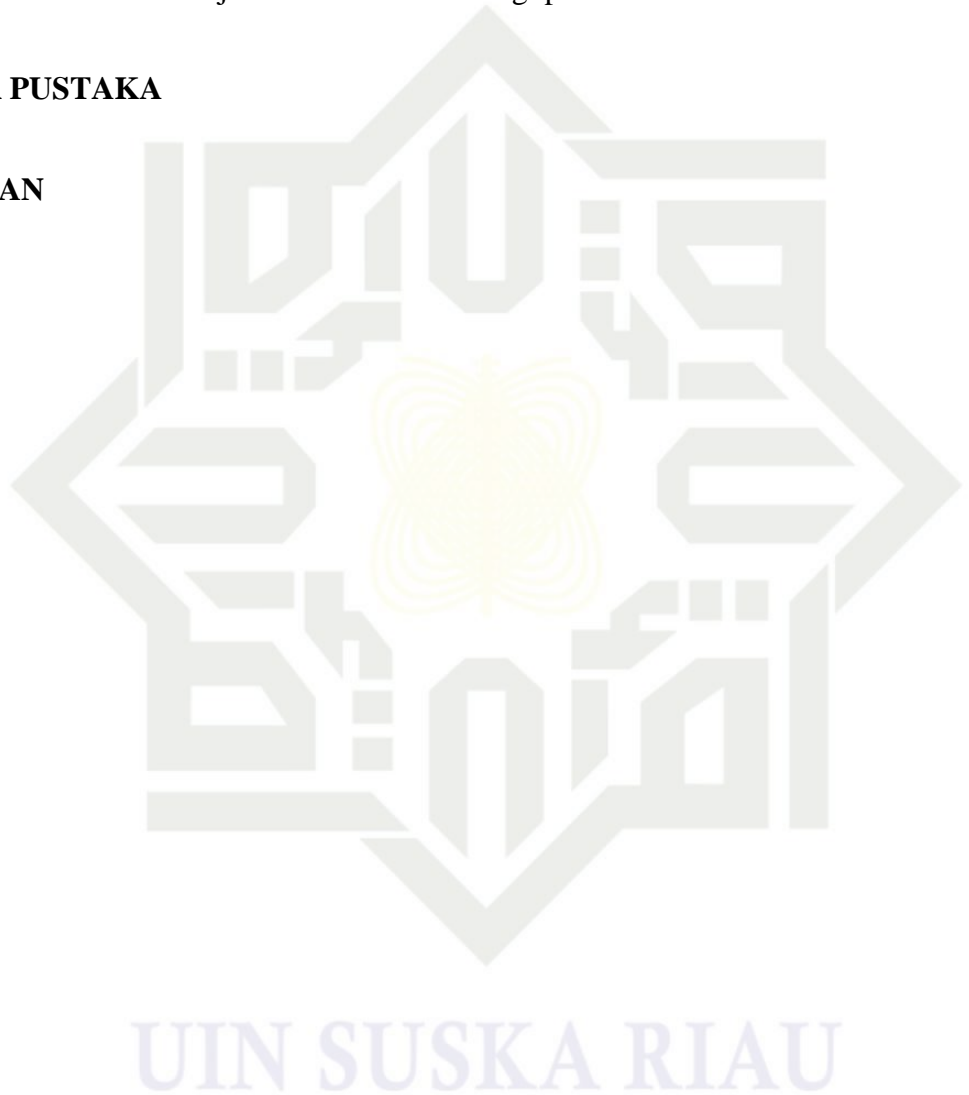
Dalam bab ini penulis menjelaskan teori yang mendukung penulisan penelitian serta membahas tinjauam praktek yang dilakukan berkaitan dengan judul penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berkaitan dengan masalah penelitian dan saran-saran yang bermanfaat menjadi bahan masukan bagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota

Pekanbaru

Pada mulanya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (selanjutnya disingkat menjadi DISPENDA) merupakan Sub Direktorat pada Direktorat Keuangan Daerah Kota madya daerah Tingkat II Pekanbaru. Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang Pembentukan Badan pendapatan Daerah Tingkat I dan II, maka pada tahun 1976 dibentuk Badan Pendapatan Daerah kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 tahun 1979. Susunan Organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut : Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Seksi Pajak dan Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Operasi/ penagihan.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II, diterbitkan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pekanbaru dengan susunan organisasi sebagai berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak, Seksi Retribusi, Seksi IPEDA, Seksi Pendapatan Lain-lain, Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubungan dengan keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota madya Tingkat II sebagai penyempurnaan dari Kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 Juni 1978, ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Dearah kota madya Daerah Tk.II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1989 tanggal 27 Desember 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Daerah Tk.II Pekanbaru Tipe B, dengan Susunan Organisasi Sebafei Berikut : Kepala Dinas, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pendaftaran dan Pendataan, Seksi Penetapan, Seksi Pembukuan dan pelaporan, Seksi Penagihan, Unit Penyuluhan.

Sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Derah, Maka Pemerintah Kota Pekanbaru menindak lanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut BAPENDA dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub Dinas Program
5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan
6. Sub Dinas Penagihan
7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain
8. Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
9. Kelompok Fungsional

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

VISI

Adapun Visi dari Badan Pendapatan Dearah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta didukung oleh peran serta masyarakat”

MISI

1. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah maupun ynag dilaksanakan oleh Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber dan potensi yang tersedia.
3. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
4. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan dibidang pendapatan.
5. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.

2.3 Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

1. Kepala Badan

Kepala Badan pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang dibidang pendapatan pajak daerah dan tugas pembantuan lainnya. Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis di bidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- b. Perumusan penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perumusan, pembinaan dan pengkoordinasian pendapat retribusi daerah terhadap perangkat daerah teknis.
- e. Perumusan dan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkup tugasnya.
- f. Perumusan dan penyelenggaraan urusan penatausahaan badan sesuai dengan kewenangannya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja badan pendapatan daerah.
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan administrasi umum, keuangan dan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat badan, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban badan.
- f. Pengkoordinasian, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Umum.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Umum serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan pengolaan tata usaha, umum, rumah tangga, perlengkapan, dan kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlak.
- f. Pelaksanaan perencanaan pelayanan pada wajib pajak, loket informasi, pemberian informasi terkait pelayanan pajak daerah serta pendistribusian berkas pelayanan kepada bidang teknis.
- g. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
- h. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana badan.
- i. Pelaksanaan kegiatan dokumentasi, pelayanan administrasi serta pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan umum.
- j. Pelaksanaan pengaturan personil, transportasi dan konsumsi, dokumentasi untuk keperluan turun kelapangan.
- k. Pelaksanaan urusan keprotokolan, pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara, rapat-rapat badan, dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga badan.
- m. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, keamanan ruangan dan halaman kantor, serta pengamanan di lingkungan badan.
- n. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, pembinaan Aparatur (BINAP) serta peningkatan kualitas pegawai.
- o. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan data pegawai serta informasi pegawai, muasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, penyusunan DUK, registrasi PNS, pengelolaan data pegawai serta pengarsipan Penilaian Prestasi Kerja PNS dilingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- p. Penyusunan dan pelaksanaan petunjuk teknis bidang pembinaan, peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai.
- q. Pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan.
- r. Pengevaluasian tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk badan penyempurnaan lebih lanjut.
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sub bagian Keuangan Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Keuangan.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Keuangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- f. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan pendapatan daerah dan verifikasi laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan penatausahaan asset meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan akuntansi badan.
- i. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah.
- j. Pelaksanaan monitoring e-KA secara berkala terhadap capaian kerja dan capaian anggaran.
- k. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- l. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat terhadap temuan hasil pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- m. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan dengan sasaran yang telah ditetapkan.
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Program dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Penyusunan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional Sub Bagian Program.
- c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Program serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kerja, laporan evaluasi kinerja, Renstra, RKA dan laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- g. Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa.
- h. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Pajak Daerah I

Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas dan fungsi membantu sebagian tugas kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan PBB-P2, BPHTB dan PPJ. Bidang Pajak Daerah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah I berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi PBB, BPHTB dan PPJ.
- c. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PPJ dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta penelitian lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan daftar nomor objek pajak PBB, BPHTB dan nomor wajib pajak daerah PPJ serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan PPJ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pengkoordinasian dan pelaksanaan perhitungan penetapan PBB-P2.
- g. Perumusan dan pelaksanaan validasi penerimaan pembayaran surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB.
- h. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penyusunan langkah strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- i. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan PPJ yang berkaitan dengan penetapan.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah I membawahi :

- a. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- b. Sub Bidang Pengelohan Data, Penilaian PBB-P2, BPHTB dan PPJ.
- c. Sub Bidang Penetapan PB-P2, BPHTB dan PPJ.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang KepalaSub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah I.

7. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan pajak daerah meliputi; Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Saarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pajak Daerah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian, dan pelaksanaan program kerja bidang pajak daerah II berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- c. Pengkoordinasian, pelaksanaan rencana bimbingan teknis pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi lokasi/lapangan.
- d. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengolhaan daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan palaksanaan perhitungan penetapan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pemberian pertimbangan atas pembetulan, atas Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Mineral Bukan Logan dan Batuan.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- h. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan pemberian informasi pajak daerah.
- i. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pemimpin sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pajak Daerah II, membawahi :

- a. Sub Bidang Pajak Hotel, Restoran, dan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Sub bidang Pajak Hiburan, Parkir, dan Sarang Burung Walet.
- c. Sub Bidang Pajak Reklame, dan Air Tanah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap Sub Bidang sebagaimana yang dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak Daerah II.

8. Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

Bidang Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu sebagian Tuga Kepala Badan dalam melaksanakan sub urusan Pengendalian Pajak Daerah. Bidang Pengendalian Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk aturan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Pengkoordinasian perhitungan pelaksanaan potensi penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, keberatan dan pengurangan Pajak Daerah.
- c. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan.
- e. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keberatan dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak daerah untuk kelancaran penerimaan daerah.

- f. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan secara berkala hasil pengendalian pajak daerah.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan bidang pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pengendalian pajak Daerah, membawahi :

- a. Sub Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
- b. Sub Bidang Penagihan, Penindakan dan Penyitaan.
- c. Sub Bidang Penyuluhan, dan Keberatan.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pajak Daerah.

9. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD mempunyai tugas membantu sebaaian Tugas Kepala Badan dalam pelaksanaan sub Urusan Hukum dan Kerjasama, Teknelogi Informatika dan Analisis Pajak Daerah, Pembukuan PAD dan Legalisasi. Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD dalam melaksanakan tugas Sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengkoordinasian program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengkoordinasian pencatatan pembukuan penerimaan/pemungutan dan penyetoran PAD serta legalisasi/perforasi dan pembukuan surat-surat berharga.
- c. Penyusunan dan pengkoordinasian perencanaan dan pengembangan dalam Peningkatan PAD.
- d. Penyusunan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
- e. Penyusunan dan pengkoordinasian pelaksanaan penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut (PAD).
- f. Pengkoordinasian pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain.
- g. Pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah.
- h. Pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap suat-surat berharga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Pengkoordinasian penghimpunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak daerah.
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD, membawahi :

- a. Sub Bidang Hukum dan Kerjasama.
- b. Sub Bidang Teknologi Informasi dan Analisa Pajak.
- c. Sub Bidang Pembukuan PAD dan Legalisasi.

Setiap Sub Bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perencanaan dan Pengembangan PAD.

10. Unit Pelaksanaan Teknis

Unit Pelaksanaan Teknik (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) kalsifikasi, yakni :

- a. UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar.
- b. UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Riau sebagaimana wakil pemerintah pusat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

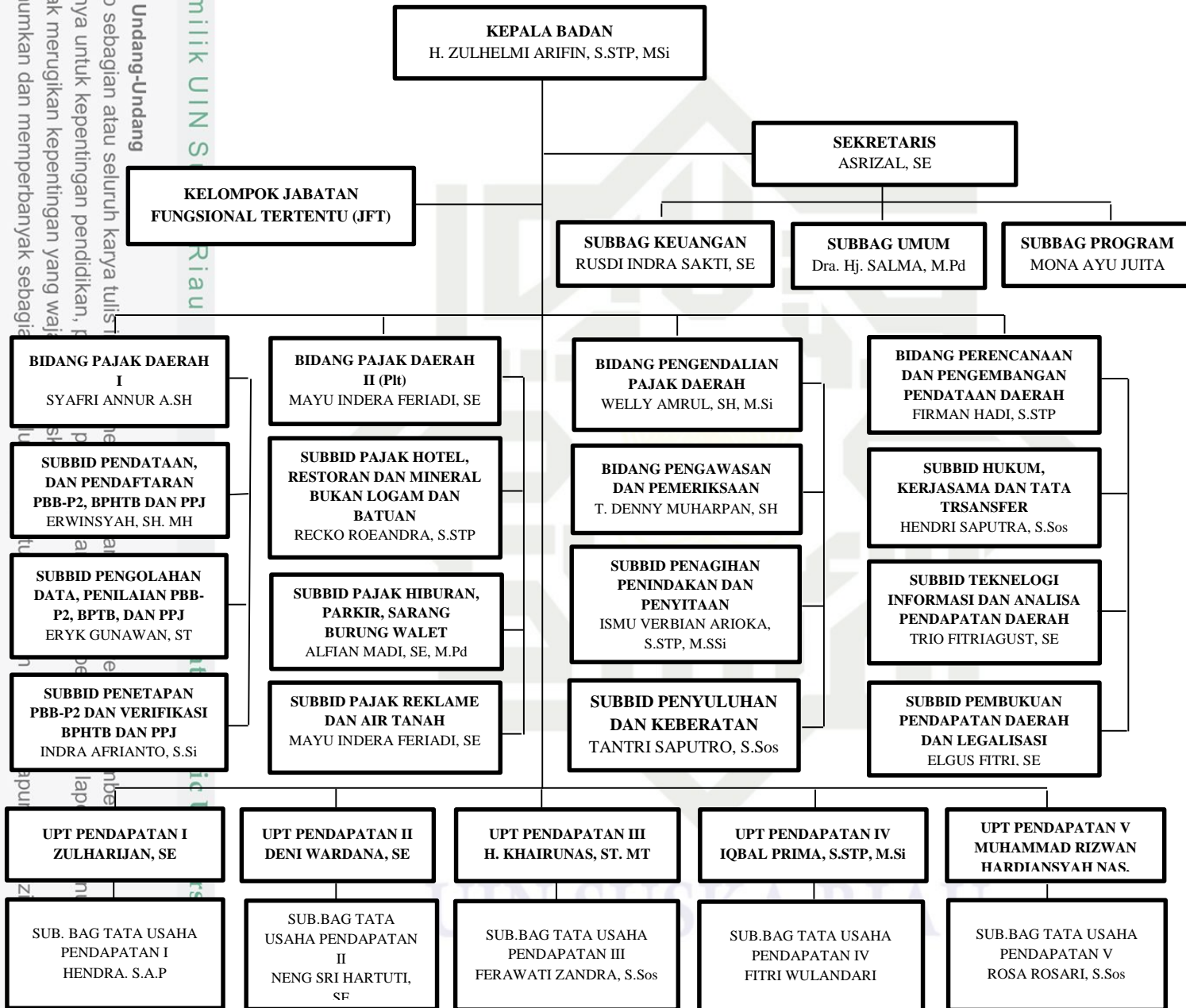
11. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan Bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- d. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPENDA Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Laju pertumbuhan pajak reklame pada tahun 2019 yaitu sebesar 32,47% sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -9.53%. untuk rata-rata pada tahun 2019-2020 laju pertumbuhan sebesar 11,47%.
2. Kontibusi yang diberikan oleh Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2018 yaitu sebesar 4,07%. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebesar 4,48%. Selanjutnya pada Tahun 2020 kontribusi pajak Reklame mengalami penurunan yaitu sebesar 1,26. Sedangkan untuk Rata-Rata kontribusi dari tahun 2018-2020 yaitu sebesar 3,27%. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi covid-19 yang menyebabkan lemahnya ekonomi, yang mempengaruhi masyarakat ataupun perusahaan menggunakan reklame untuk mempromosikan produknya.
3. Hambatan yang dialami oleh BAPENDA dalam pemungutan pajak reklame yaitu, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Yaitu Kurangnya penerapan sanksi bagi wajib pajak, kurangnya pantauan dan pendataan, ditambah dengan kurangnya kesadaran dari wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak, lalu ketidak jujuran wajib pajak dalam melaporkan hasil pemasangan reklame.

4. Upaya yang dilakukan bapenda kota pekanbaru dalam meningkatkan pendapatan pajak reklame dengan melakukan sosialisasi, pendataan, penertiban, dan pemantauan dilapangan secara langsung terhadap reklame-reklame yang illegal.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru agar lebih gencar dalam meningkatkan sosialisasi, penyuluhan kepada wajib pajak mengenai pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Terus meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dimasa pandemi, bagi wajib pajak yang masih belum paham dengan segala kebijakan-kebijakan pajak dan memberikan arahan dalam membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.
3. Dalam pengawasan pajak reklame diharapkan meningkatkan sanksi yang tegas, sehingga tidak memberikan kesempatan untuk oknum-oknum yang dilapangan untuk melakukan kecurangan dalam pemasangan reklame.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa besar tingkat laju pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame dalam meningkatkan PAD dikota Pekanbaru?
2. Apa penyebab laju pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru?
3. Berapa tarif Pajak Reklame yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana untuk perkembangan Pajak Reklame dan Wajib Pajaknya sendiri, apakah ada peningkatan atau penurunan?
5. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh BAPENDA dalam pemungutan Pajak Reklame pada situasi Covid-19?
6. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk tetap mengoptimalkan penerimaan Pajak Reklame pada masa Pandemi ini?
7. Dari upaya-upaya yang telah dilakukan, apakah sudah efektif penerimaan Pajak Reklame dikota Pekanbaru?

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 59

Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto, dan Agus Puji Priyono. 2018. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta : Selemba Empat.

Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ilyas, Wirawan B, dan Richard Burton. 2008. *Hukum Pajak* . Jakarta : Salemba Empat

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : ANDI.

Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Selemba Empat.

Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ed. Revisi) Jakarta : Raja Wali Pers.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 82 tahun 2020 Tentang Pembebasan Pajak Dearah Dalam Masa penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame.

Peraturan Walikota Pekanbaru Tahun 2013 Tentang Penyengleggaraan Reklame Di Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Primandari, N, R & Dahlia, E. 2020. Kintribusi dan efektifitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Ogan Komering Ulu periode tahun 2013-2017. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)* 1(2) : 123-134



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratdiananto, A., & Musadieg, M.,A., & Hidayat, K., 2016. Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*. 8(1) : 1-6

<https://www.pajakku.com/read/5d82eb4574135e0390823b09/Defenisi-Pajak-Daerah-dan-Jenis-Jenis-Pajak-Daerah> (diakses pada tanggal 22 April 2021, pukul 12:36)

<https://nurmuhkur.wordpress.com/2017/01/24/pajak-dalam-pandangan-islam/> (diakses pada tanggal 22 April, pukul 19:41)

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fungsi-pajak-bagi-pembangunan-bangsa-dan-negara=secara-garis-besar-fungsi-pajak-fungsi-Mengatur-dan-fungsi-stabilitas> (diakses pada tanggal 09 juni 2021, pukul 13.01)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK REKLAME

URAIAN PENDAPATAN	2018		2019		2020	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	8	9	10	11	6	7
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.085.555.818.588	573.154.196.275	963.784.076.614	690.931.414.830	2.677.810.624.465	2.214.887.438.703
HASIL PAJAK DAERAH	847.384.410.838	499.533.628.098	784.882.467.046	620.937.643.530	783.260.371.972	921.026.841.929
PAJAK REKLAME	222.017.565.881	23.366.476.775	148.126.884.833	30.954.181.681	27.103.188.591	28.003.177.528

KEPALA SEKSI PEMBUKUAN PAD DAN LEGALISASI



ELGUS FITRI SE
NIP. 19800817 200901 2 007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/1632/2021
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Pekanbaru, 04 Maret 2021 M
 20 Rajab 1442 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Ramayani
 NIM. : 01870621292
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020)"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/39365
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN LTA



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/2021 Tanggal 4 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

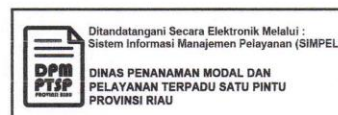
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RAMAYANI |
| 2. NIM / KTP | : 01870621292 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
| 4. Jenjang | : DIII |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI LAJU PERTUMBUHAN PAJAK REKLAME TAHUN 2019-2020) |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 5 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/1574/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Pekanbaru, 3 Maret 2021

Kepada
Yth. Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Ramayani
NIM : 1870621292
Prodi : D3 Administrasi Perpajakan
Semester : VI (Enam)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"Analisis Laju Pertumbuhan penerimaan Pajak Reklame dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru pada Masa Pandemi Covid19 (Studi laju pertumbuhan pajak reklame tahun 2019-2020)".

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, SE, M.Si, Ak, CA
NIP. 19751112 199903 2 001

Tembusan :
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/793/2021



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/39365 tanggal 5 Maret 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : RAMAYANI
2. NIM : 01870621292
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ADMINISTRASI PERPAJAKAN
5. Jenjang : DIII
6. Alamat : JL. JENDRAL SUDIRMAN KEL. TELUK NILAP KEC. KUBU BABUSSALAM-ROKAN HILIR
7. Judul Penelitian : ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PEKANBARU PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI LAJU PERTUMBUHAN PAJAK REKLAME TAHUN 2019-2020)
8. Lokasi Penelitian : BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 8 Maret 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750715 199311 1 001

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis lahir di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Pada Tanggal 08 Desember 1999. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Amat Safawi dan ibu Robakiyah. Penulis mengawali pendidikan pada Tahun 2005 di TK Permata Bunda di Desa Teluk Nilap, selanjutnya pada Tahun 2006 Penulis melanjutkan Pendidikan di SDN 004 Teluk Nilap, kemudian pada Tahun 2012 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Al-Jam'iatul Washliyah di Desa Sungai Majo Pusako dan pada Tahun 2015 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA N 1 Kubu Babussalam. Pada Tahun 2018 penulis di terima menjadi Mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial melalui jalur UNDANGAN MANDIRI. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di PT. Nippon Indosari Corpindo. Tbk, selama 2 (dua) bulan terhitung pada bulan Juli sampai Agustus 2020. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau ini, maka penulis mengajukan judul Tugas Akhir dengan Judul **“Analisis Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Laju Pertumbuhan Pajak Reklame Tahun 2019-2020).**